

Jurnal Tata Sejuta Vol. 5, No. 2 September 2019

Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM

http://ejurnalstiamataram.ac.id P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

CONTENT KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH UNTUK PENGURANGAN KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN KUPANG

Mariayani Oktafiana Rene¹, Kismartini², Hartuti Purnaweni³

1,2,3 Universitas Diponegoro

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 22 Juni 2019
Disetujui: 20 September
2019
Dipublikasikan: 25

Dipublikasikan: 25 September 2019

Kata Kunci: Isi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Mortalitas Bayi

Abstrak

Content atau isi dari suatu kebijakan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana content atau isi dari Perda No 3 Tahun 2016 sebagai kebijakan untuk pengurangan kematian bayi di kabupaten Kupang, dengan menggunakan salah satu unsur dari model implementasi Najam (1995) yaitu content. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan content atau isi dari Perda No 3 Tahun 2016 sudah dengan jelas memuat tujuan yang hendak dicapai, dan cara mencapai tujuan tersebut. Cara mencapai tujuan yang ditetapkan juga telah sesuai dengan sebab-akibat masalah kematian bayi di Kabupaten Kupang.

POLICY CONTENT IN REGIONAL REGULATIONS IMPLEMENTATION TO REDUCE BABY DEATH IN DISTRICT KUPANG

Keywords:
Content of
Policy, Policy
Implementation,
Infrant Mortality

Abstract

The content of a policy is one of the factors that determine success in the policy implementation process. This study aims to analyze how the content of Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2016 as a policy for reducing infant mortality in Kupang regency, using one of the elements of the implementation model by Najam (1995), namely content. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews and literature studies. The results of the study show that the content of Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2016 clearly contain the objectives to be achieved, and how to achieve these objectives. The way to achieve the stated goals is also in accordance with the causes of infant mortality problems in Kupang Regency

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

[™]Alamat korespondensi:

¹mariayanirene@gmail.com, ²kis_martini@yahoo.co.id, ³hartutipurnaweni@gmail.com

PENDAHULUAN

Kematian bayi merupakan masalah yang penting dan menjadi perhatian dari berbagi pemerintah dunia, khususnya pada negara-negara berkembang. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi kematian bayi, namun pada tahun 2017 diketahui masih ada sekitar 1 diantara 26 bayi yang meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka (World Health Organization, 2017). Tahun 2016 PBB juga telah menetapkan upaya pengurangan kemtaian bayi ini ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan, SDGs yaitu untuk menurunkan kematian neonatal hingga 12 kematian per 1000 KH (World Economic Forum, 2018).

Indonesia sebagai anggota dari PBB juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan agenda pembangunan tersebut. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara dengan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi. Dikatahui pada tahun 2015 AKB Indonesia mencapai 27 Per 1000 KH, sangat tinggi apabila dibandingkan dengan AKB Singapura yaitu 3 Per 1000 KH dan Malaysia 7 Per 1000 KH (Rene, 2019). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kasus kematian bayi yang tinggi ialah Kabupaten Kupang. Tahun 2015 diketahui AKB Kabupaten Kupang mencapai 63 Per 1000 KH (Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, 2018).

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang sebagai administrator negara, memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah tingginya kematian bayi di Kabupaten Kupang. Sejak tahun 2010, mengikuti kebijakan kesehatan ibu dan anak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Revolusi KIA, Pemerintah Kabupaten Kupang membuat kebijakan kesehatan ibu dan anak tingkat Kabupaten dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) No 16 Tahun 2010 tentang percepatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kupang. Namun selama lima tahun pelaksanaannya ternyata kebijakan ini gagal dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi kematian ibu, khususnya kematian bayi di Kabupaten Kupang. Bahkan pada tahun 2015 justru terjadi peningkatan kasus kematian ibu dan kematian bayi (Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, 2018). Oleh karena gagalnya kebijakan ini, maka pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kupang membuat sebuah kebijakan baru sebagai perbuhan atas Perbup No 16 Tahun 2010 yaitu Perda No 3 Tahun 2016 tentang Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak dibawah lima tahun (KIBBLA). Perda ini menekankan pada upaya mendekatkan layanan kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi berbagai kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kupang.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang rumit (Carter, 2019:721; Campos and Reich, 2019:2). Kompleksnya implementasi sebuah kebijakan menurut (Najam, 1995) terjadi karena ada berbagai faktor penting yang berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Najam (1995) menjelaskan bahwa ada lima faktor penting yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik. Kelima faktor ini, dikenal dengan istilah 5*C Protocol*, yaitu: 1) content of the policy, yaitu isi dari kebijakan tersebut, 2) context, yaitu konteks dari lembaga pelaksana kebijakan, 3) commitment, yaitu komitmen dari aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan, 4) capacity, yaitu kapasitas dari aktor pelaksana kebijakan, dan 5) clients and coalitions, yaitu pihak-pihak yang dipengaruhi baik yang diuntungkan maupun dirugikan dari penerapan sebuah kebijakan (Bayrakal, 2006:131; Chaya et al., 2019:1052).

Isi dari kebijakan atau *content of the policy* menurut Najam (1995) merupakan apa yang ada dalam isi kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. *Content* kebijakan terdiri atas; 1) apa yang ditetapkan oleh kebijakan untuk harus dicapai (tujuan dari kebijakan), 2) analisis dari masalah, yaitu apakah isi kebijakan menguraikan sebab dan akibat dari masalah (teori kausal), dan, 3) cara untuk memecahkan masalah yang ada (metode) (Rene, 2019:57). Isi atau content dari sebuah kebijakan sebagai faktor yang penting dan turut berdampak dalam proses implementasi kebijakan juga disampaikan oleh ahli kebijakan lainnya. Diantaranya ialah Van Meter & Van Horn (Meter and Horn, 1975) yang menyebutnya sebagai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.(Grindle, 1980) juga menjelaskan pentingya faktor *content* kebijakan dalam implementasi. Ia menjelaskan *content* sebagai apa yang ada dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Memahami bagaiman isi atau content dari sebuah kebijakan, menjadi penting, hal ini karena mungkin saja sebuah kebijakan gagal diimplementasikan karena tidak didukung oleh isi atau *content* dari kebijakan tersebut. Apabila dikaitkan dengan tingginya kematian bayi di Kabupaten Kupang walaupun telah ada kebijakan yang diimplementasi, maka perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisis isi atau *content* dari kebijakan tersebut. Analisis pada isi atau *content* kebijakan juga menjadi penting untuk dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan sebuah kebijakan sebenarnya telah memiliki dan memuat semua unsur yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah atau pencapaian tujuan, tetapi ketika tujuan itu tidak tercapai maka kebijakan

ini diganti dengan kebijakan yang baru yang sebanarnya tidak diperlukan. Hal ini juga yang perlu ditinjua pada implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kupang.

Penelitian tentang implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian Febriandini, Rengga and Marom (2016) yang menunjukkan bahwa gagalnya implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak karena kurangnya dukungan sikap pelaksana, ketersediaan petugas dan sarpras, serta kepatuhan pelaksana. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mwalali and Ngui, 2009) yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketersedian sumber daya dan program, dan kurang jelasnya defenisi dari tujuan yang hendak dicapai menjadi fakor menghambat proses implementasi. Sementara penelitian yang mengkaji isi atau *content* dari kebijakan, khususnya pada kebijakan kesehatan ibu dan anak masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini hendak menganallisis bagaimna isi atau *content* dari pada Perda No 3 Tahun 2016 dalam upaya pengurangan kematian bayi di Kabupaten Kupang, dengan melihat kepada tiga hal yaitu tujuan kebijakan, pengkajian sebab akibat dari masalah, dan metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Informan dalam penelitian ini ditentukan mengggunakan teknik purposive, yang artinya informan ditentukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini ialah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Kepala Puskesmas Tarus dan Kepala Puskesmas Oesao, dan Camat Kupang Tengah. Analisis data menggunakan Teknik dari Miles and Huberman (1994), yaitu mulai dari pengumpulan data di lapangan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Content atau isi dari Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun (KIBBLA) terdiri atas tujuh bab, yaitu; Bab 1 tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan dan arti dari KIBBLA, Bab II tentang penyelenggaraan KIBBLA, Bab III tentang sumber daya kesehatan, Bab IV tentang koordinasi, pembinaan dan pengawasan, Bab V tentang peran serta masyarakat, Bab VI tentang penyuluhan kesehatan dan Bab VII tentang penghargaan.

Content atau isi kebijakan menurut Najam (1995) memuat tiga hal penting yaitu; apa yang hendak dicapai oleh kebijakan (goals), analisis akan sebab akibat dari masalah (Causal theory), dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Method).

Tujuan (*Goals*) Perda No 3 Tahun 2016 Sebagai Kebijakan Untuk Pengurangan Kematian Bayi Di Kabupaten Kupang

Perda No 3 Tahun 2016, sebagai sebuah kebijakan untuk penurunan kematian bayi di Kabupaten Kupang memiliki tujuan yang tercantum pada Pasal 4, yaitu:

- a) Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA di Kabupaten Kupang.
- b) Tersedianya fasilitas yang memadai serta pelayanan KIBBLA yang terjangkau, bermutu dan aman di Kabupaten Kupang
- c) Terdorongnya perubahan perilaku masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional; dan
- d) Tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita di Kabupaten Kupang.

Pentingnya perumusan tujuan kebijakan dalam *content* atau isi suatu kebijakan juga disampaikan oleh Meter & Horn (1975) dan juga Grindle (1980) dimana Meter & Horn menyebutnya sebagai sebagai ukuran-ukuran dasar, sementara Grindle menyebutnya sebagai jenis manfaat yang dapat diperoleh dan jangkauan perubahan yang diharapkan. Pada dasarnya tujuan kebijakan ini berguna dalam menguraikan capaian-capaian dari kebijakan yang telah direalisasikan. Berdasarkan tujuan yang dirumuskan terlihat bahwa upaya untuk mengurangai kematian ibu dan khususnya kematian bayi, merupakan sebuah upaya yang tersusun secara sistematis. Dimana adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terjangkau dan bermutu. Kemudian implementasi kebijakan ini juga berdampak kepada perubahan perilaku masyarkat dalam pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan, dan juga perubahan perilaku dari tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sehingga apabila tiga tujuan ini telah tercapai maka akan berdampak pada pencapaian tujuan yang ke empat yaitu pengurangan kasus kematian ibu, dan khususnya kematian bayi.

Tujuan Perda No 3 tahun 2016, ternyata juga tidak jauh berbeda dengan tujuan dari kebijakan kesehatan ibu dan anak yang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati (Perbup) No 16 tahun 2010. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan

informan di lapangan yang menjelaskan bahwa secara tujuan Perda No 3 Tahun 2016 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bawah lima tahun (KIBBLA) memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan yang sebelumnya yaitu untuk mengurangi kematian ibu dan khususnya kematian bayi di Kabupaten Kupang. Perda No 3 Tahun 2016 lebih menekankan pada upaya mendekatkan layanan kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Perda No. 3 Tahun 2016 juga merupakan kebijakan kesehatan ibu dan anak daerah Kabupaten Kupang yang merujuk kepada kebijakan kesehatan ibu dan anak Provinsi NTT yaitu revolusi KIA. Sehingga secara tujuan tidak ada masalah perihal tujuan kebijakan, karena masih tetap berfokus untuk mengurangai permasalahan tingginya kematian ibu dan khususnya kematian bayi di Kabupaten Kupang.

Dalam proses implementasi Kebijakan salah satu hal yang penting ialah kejelasan dari tujuan kebijakan dan pemahaman akan tujuan kebijakan oleh lembaga pelaksana. Ini seperti yang disampaikan oleh (Arshed dan Mason, 2016:1583; Olavarria-Gambi, 2017:43); bahwa tidak jelasnya penjabaran tujuan kebijakan dan pemahaman pelaksana akan tujuan kebijakan dapat menjadi faktor gagalnya kebijakan implementasi kebijakan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui pemahaman akan tujuan Perda No. 3 Tahun 2016 sebagai kebijakan untuk pengurangan kematian bayi di Kabupaten Kupang oleh lembaga pelaksannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pehaman tujuan kebijakan oleh lembaga pelaksana Perda No 3 Tahun 2016. Diketahui pada Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Camat sudah memahami akan tujuan kebijakan ini secara detail. Untuk pelaksana di lapangan, yaitu bidan dan kader posyandu, diketahui juga telah memahami tetapi, tidak secara detail memahami tujuan dari kebijkan ini, namun karena Perda No 3 Tahun 2016 sebagai kebijakan untuk pengurangan kematian bayi secara umum memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang telah ada sebelumnya, baik itu Peraturan Bupati ataupun Revolusi KIA sebagai kebijakan kesehatan ibu dan anak tingkat Provinsi NTT. Maka bidan desa dan kader dari wawancara mengatakan bahwa mereka tetap memahami tujuan dari kebijakan ini karena kebijakan ini bukanlah sesuatu yang baru dan tetap berpedoman pada kebijakan yang telah ada sebelumnya, mereka tetap mengetahui secara garis besar tujuan dari kebijakan ini, yaitu untuk pengurangan kematian ibu dan khsuusnya kematian bayi. Bagi mereka walaupun kebijakan berubah namun tujuannya masih tetap sama karena permasalahan di lapangan juga masih sama yaitu tingginya kematian ibu dan bayi.

Analisis Sebab- akibat dari Kematian Bayi di Kabupaten Kupang (Causal Theory)

Analisis sebab dan akibat dari suatu masalah adalah penting untuk dilakukan, karena dengan mengetahui sebab dan akibat secara tepat, maka treatmen yang diberikan atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut juga akan tepat. Begitu pula dengan masalah kematian bayi di kabupaten Kupang, yang perlu diketahui sebab dan akibatnya sehingga bisa dinilai apakah treatment atau cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut sudah tepat atau belum.

Content atau isi dari Perda No 3 tahun 2016 memang tidak secara eksplisit menjabarkan tentang sebab-akibat dari tingginya kematian bayi di Kabupaten Kupang, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut, bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, dalam arti kebijakan kesehatan ibu dan anak ini merupakan kebijakan yang mengganti kebijakan kesehatan ibu dan anak yang sebelumnya telah ada. Dan kebijakan ini juga merupakan turunan dari kebijakan kesehatan ibu dan anak Provinsi NTT yaitu Revolusi KIA, sehingga masalah yang mendasari lahirnya kebijakan ini telah diuraikan oleh kebijakan yang sebelumnya.

Walaupun Perda No 3 tahun 2016 tidak menjelaskan secara eksplisit sebabakibat dari masalah tingginya kemtaian ibu dan khususnya kematian bayi di Kabupaten Kupang, namun secara metode atau cara untuk mencapai tujuan kebijakan menurut analisis peneliti telah sesuai untuk mengatasi penyebab dari kematian bayi di Kabupaten Kupang. Adapun data penyebab kematian bayi di Kabupaten Kupang (Dinkes, 2018) menunjukkan bahwa antara tahun 2012 hingga 2017, rata-rata kasus kematian bayi di Kabupaten Kupang disebabkan oleh asfiksia, BBLR atau bayi lahir dengan berat yang rendah, ISPA, kejang demam, diare dan lahir prematur. Adapun penyebab dari berbagai kasus kematian bayi ini ialah, kurangnya kesadaran dari ibu hamil dan pihak keluarga untuk melakukan pemeriksaan kandungan, usia ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) dan terlalu tua (di atas 35 tahun) saat mengandung. kesadaran ini memang tidak bisa terlepas dari faktor rendahnya pendidikan dan minimnya informasi yang diterima baik itu dari si ibu maupun dari pihak keluarga, seperti yang ditemukan pada variabel context. Penyebab lainnya ialah kondisi ekonomi keluarga dari ibu hamil yang berdampak pada pemenuhan gizi ibu hamil dan juga kondisi kesehatan ibu hamil, yaitu ibu hamil dengan anemia atau malaria.

Penyebab kematian lainnya ialah diare yang terjadi karena buruknya sanitasi dimana masih ada rumah penduduk yang tidak memiliki WC dan juga kebersihan lingkungan tempat tinggal bayi. sementara itu kematian karena kejang demam pada umumnya terjadi karena pertolongan yang terlambat diberikan, hal ini terjadi karena

pihak keluarga yang terlambat membawah bayi untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan, hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh hasil penelitian dari Daga (2014); Febriyuna (2015) dan juga laporan (Australian NGO Cooperation Program (ANCP), 2018) bahwa kurangnya pendidikan ibu, kurangnya kesadaran masyarakat, usia dan kondisi kesehatan ibu, kemiskinan atau kemampuan ekonomi dan kondisi lingkungan, sanitasi serta ketersedian air bersih menjadi faktor yang menyebabkan tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Cara Mencapai Tujuan untuk Menurunkan Kematian Bayi di Kabupaten Kupang (Method)

Cara mencapai tujuan kebijakan Perda No. 3 tahun 2016 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun (KIBBLA) telah dijabarkan dalam isi kebijakan, yang meliputi; pertama, dengan bentuk penyelenggaraan KIBBLA, yaitu dengan penyediaan layanan kesehatan yang meliputi layanan ibu hamil (Pasal 10), layanan ibu melahirkan (Pasal 11), layanan ibu menyusui (Pasal 16). Dalam penyelenggaraan KIBBLA ini juga dijelaskan peran dari suami untuk siap antar jaga istri yang hamil dan hendak melahirkan (Pasal 17), peran dari dukun beranak (Pasal 19), peran dari Kader MTBS-M (Pasal 20), peran dari tenaga kesehatan (Pasal 21-Pasal 33). Kedua, selain penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, Perda No. 3 Tahun 2016 juga berisi tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan (Pasal 36), peralatan kesehatan (Pasal 39), dan anggaran penyelenggaraan KIBBLA yang memadai (Pasal 41). Ketiga, Perda No. 3 Tahun 2016 juga berisi tentang Koordinasi, Pembinaan, dan pengawasan untuk mengsukseskan program dan kegiatan KIBBLA (pasal 43-Pasal 45). Keempat, pelibatan peran serta dari masyarakat yang meliputi peran dari keluarga (Pasal 47), Peran dari masyarakat (Pasal 48), peran dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama (Pasal 49), peran dari Kader Posyandu (Pasal 50), dan peran dari Desa dan Kelurahan siaga. Dan yang Kelima, ialah penyuluhan kesehatan atau informasi KIBBLA yang wajib diberikan oleh OPD penyelenggara kesehatan.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam isi Perda No 3 tahun 2016, maka metode atau cara yang dilakukan untuk mengurangi kematian bayi di Kabupaten Kupang, dilakukan dengan menyediakan layanan kesehatan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga layanan kesehatan bayi dan balita, menyediakan sumber daya untuk terlaksananya pelayanan KIBBLA, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan

melibatkan peranan dari masyarakat dalam penyelenggaraan KIBBLA dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang KIBBLA.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *content* atau isi kebijakan yaitu isi dari Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan KIBBLA telah memuat tujuantujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten Kupang. Cara menyelesaikan permasalahan (metode) yang tercantum dalam isi Perda juga telah sesuai dengan penganalisis sebab akibat dari masalah tingginya kematian bayi di Kabupaten Kupang sehingga dari sisi isi Perda tidak ada masalah. Sehingga rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, ialah untuk tidak perlu mengganti kebijakan apabila ternyata dalam pelaksanaanya ternyata kematian bayi di Kabupaten Kupang belum berhasil dikurangi. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan di lapangan dari segi ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Grindle, M. (1980) *Politics And Policy Implementation In The Third World.* New Jersey: Princeton University Press.
- Miles, Mathhew. B. & Huberman, A. Michael. (1994) *Qualitative Data Analysis*. second. Edited by R. Holand. Thousand Oaks: SAGE Publication.
- Najam, Adil. (1995) Learning From The Literature On Policy Implementation: A Synthesis Prespective. Laxenbug: IIASA.

Artikel Jurnal:

- Arshed, N. and Mason, C. (2016) 'Exploring the Disconnect in Policy Implementation: A Case Of Enterprise Policy in England', *Government and Policy*, Vol. 34(8). doi: 10.1177/0263774X16628181.
- Australian NGO Cooperation Program (ANCP) (2018) 'Reducing child mortality in Indonesia Department of Foreign Affairs and Trade', *Department of Foreign Affairs and Trade, Australia Government*, April.
- Bayrakal, S. (2006) 'The U.S. Pollution Prevention Act: A Policy Implementation Analysis', *The Social Science Journal*, (43), pp. 127–145.
- Campos, P. A. and Reich, M. R. (2019) 'Political Analysis for Health Policy Implementation', *Health Systems & Reform*. Taylor & Francis. doi: 10.1080/23288604.2019.1625251.
- Carter, P. (2019) 'Time Tactics: Project Managing Policy Implementation in A Network, Vol. 28(2). doi: 10.1177/0961463X16682517.
- Chaya, W. et al. (2019) 'Challenges and Pitfalls in Implementing Thailand's Ethanol Plan: Integrated Policy Coherence and Gap Analysis', *Energy Policy*. Elsevier

- Ltd, 132(June), pp. 1050–1063. doi: 10.1016/j.enpol.2019.06.061.
- Daga, G. (2014). Reducing Maternal Mortality in Indonesia Post Modern Era, (May), 1. Retrieved from ResearchGate
- Febriandini, A. P., Rengga, A. and Marom, A. (2016) 'Studi Implementasi Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang', *journal of Public Policy and Management Review*, Volume 5.
- Febriyuna, N. (2015) 'Determinants of Infant Mortality in Indonesia', (December).
- Meter, D. S. Van and Horn, C. E. Van (1975) 'The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework', *Administration & Society*, 6: 445. doi: DOI: 10.1177/009539977500600404.
- Mwalali, P. and Ngui, E. (2009) 'Reduction in Maternal and Child Mortality in Sub-Saharan Africa: The Yo-Yo Effect in Delivering on The Promise', *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 20, p. 149.
- Olavarria-Gambi, M. (2017) 'Policy Implementation: Lessons from The Chilean Policy on Public Management Modernization', *Public Policy*, 11(1), pp. 41–54. doi: 10.1515/ceipp-2016-0030.
- Rene, M. (2019) Analisis 5C Protocol pada kebijakan pengurangan kematian bayi di Kabupaten Kupang. Thesis. Magister Administarsi Publi. Universitas Diponegoro.

Laporan

- Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang (2018) Laporan Tahunan Program Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Kupang.
- World Economic Forum (2018) *The two best ways to reduce infant mortality*. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/08/the-two-best-ways-to-reduce-infant-mortality.
- World Health Organization (2017) *Under-five mortality*. Available at: https://www.who.int/gho/child_health/mortality/mortality_under_five_text/en/.